



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal tiga bulan Mei Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan

Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
6. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.115.692.671.677,- bertambah sebesar Rp691.650.352.737,-sehingga menjadi Rp1.807.343.024.414,-. dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.059.754.953.274,- |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 310.973.026.227,-</u> |

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.370.727.979.501,-

2. Belanja Daerah

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.113.802.671.677- |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 692.790.352.737,-</u> |

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.806.593.024.414,-

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan pembiayaan

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 55.937.718.403,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 380.677.326.510,-</u> |

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 436.615.044.913,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.890.000.000,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 1.140.000.000,-</u> |

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 750.000.000,-

c. Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 435.865.044.913,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp. 0,-

A.A

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 108.521.974.054,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 11.774.982.636,-</u> |

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp120.296.956.690,-

b. Pendapatan Transfer

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 937.394.543.220,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 307.616.043.591,-</u> |

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.245.010.586.811,-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 13.838.436.000,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp. 8.418.000.000,-)</u> |

Jumlah Setelah Perubahan Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rp5.420.436.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak daerah;

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 48.700.000.000,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 7.710.000.000,-</u> |

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp56.410.000.000,-

b. Retribusi Daerah;

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp 8.798.446.054,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 30.550.546,-</u> |

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 8.828.996.600 ,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.870.000.000,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> |

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 5.870.000.000,-

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 45.153.528.000,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 4.034.432.090,-</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan
Rp. 49.187.960.090,-
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 869.335.411.000,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 265.941.887.960,-</u> |
- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan
Rp.1.135.277.298.960,-
- b. Transfer antar daerah
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 68.059.132.220,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 41.674.155.631,-</u> |
- Jumlah tranfer antar daerah setelah perubahan
Rp 109.733.287.851,-
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- Pendapatan hibah;
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 10.546.500.000 ,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp. 8.418.000.000,-)</u> |
- Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 2.128.500.000,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 763.164.018.881,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 291.875.901.166,-</u> |
- Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.055.039.920.047,-
- b. Belanja modal;
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 226.105.050.486,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 370.914.434.449,-</u> |
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 597.019.484.935,-

- c. Belanja tidak terduga;
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 282.825.822,-</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 5.282.825.822,-

- d. Belanja transfer :
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 119.533.602.310,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 29.717.191.300,-</u> |
- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.149.250.793.610,-

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp376.094.994.820,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 92.008.132.748,-</u> |
- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp468.103.127.568,-
- b. Belanja barang dan jasa;
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 286.524.808.109,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp194.722.623.749,-</u> |
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp481.247.431.858,-
- c. Belanja hibah;
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp89.624.415.952,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp (1.574.055.331),-</u> |
- Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp88.050.360.621,-
- d. Belanja bantuan sosial;
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 10.919.800.000,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 6.719.200.000,-</u> |
- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahanRp17.639.000.000,-

(2) belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah;
- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp 6.196.600.000,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp19.834.967.685,-</u> |
- Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp26.031.567.685,-

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp54.909.086.674,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp20.940.489.115,-</u> |

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan
Rp75.849.575.789,-

c. Belanja bangunan dan gedung;

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 65.813.283.962,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 84.047.407.116,-</u> |

Jumlah belanja bangunan dan gedung setelah perubahan
Rp149.860.691.078,-

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 99.066.080.850,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp242.806.311.733,-</u> |

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan
Rp341.872.392.583,-

e. Belanja modal aset tetap lainnya:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp 80.199.000,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp3.310.058.800,-</u> |

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan
Rp3.390.257.800,-

(3) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil;

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.749.844.610,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 775.000.000,-</u> |

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp6.524.844.610,-

b. Belanja bantuan keuangan:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 113.783.757.700, |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 28.942.191.300,-</u> |

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Rp142.725.949.000,-

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang naggarannya belum tersedia dalam anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah dalam yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 14 2023

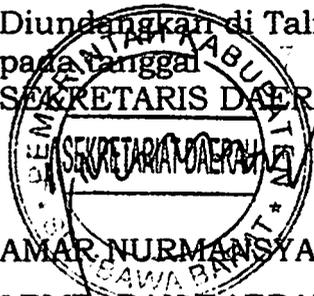
BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 14 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMAN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT 25 TAHUN 2023